

AKTIVITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) CABANG KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977-1987

Moch. Eshza Akbarsyah¹⁾
Pradipta Niwandhono²⁾

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang aktivitas PDI cabang kota Surabaya dalam pemilihan umum tahun 1977-1987. PDI merupakan hasil fusi dari 5 partai politik, yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI. Dari data hasil pemilu tahun 1977 di Surabaya, PDI menjadi partai ketiga setelah Golkar dan PPP dalam perolehan hak pilih atau suara. Pembahasan tulisan ini terdiri dari beberapa hal antara lain: latar belakang lahirnya PDI, hasil suara pemilihan umum tahun 1977, 1982, dan 1987 yang didapat PDI secara nasional. Serta menjelaskan aktivitas dan hasil suara Pemilihan umum PDI kota Surabaya tahun 1977, 1982, dan 1987.

Kata kunci : Fusi Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia, Pemilihan Umum.

Abstract

This paper will discuss about PDI Surabaya subdivision in 1977-1987 general election years. There are 5 politic parties that become the basic roots from PDI, such as PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, and IPKI. Based on report of 1977 election year in Surabaya, PDI has become the third party in voting ladder after Golkar and PPP. Also this paper will discuss another few point, such as PDI background, and PDI national vote result for 1977, 1982, and 1987 election years. Will explain PDI Surabaya activity and voting result for 1977, 1982, and 1987 general election years.

Keywords : Merge of Politic Parties, Partai Demokrasi Indonesia (Indonesian Democrate Party), General Election.

Pendahuluan

Partai politik adalah salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal-mula, bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat Negara (Inu, 2002: 77).

PDI sebagai organisasi politik, harus dapat berkembang dan tampil dalam percaturan politik di negara Indonesia serta memperoleh kepercayaan rakyat karena programnya sesuai dengan

program pembangunan (Surabaya Post 1 September 1976). Sistem politik pada hakekatnya melaksanakan fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan merubah unsur pertautan hubungan agama dan sistem ekonom, melindungi kesatuan sistem politik dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap masyarakat lain dan menyerangnya. Secara periodik pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilihan umum 6 (enam) kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, email eshza.akbarsyah@gmail.com

2) Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Proses Fusi dan Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia

Landasan legal bagi penataan kepartaian disiapkan, yakni melalui Tap MPRS XII/MPRS/66 tentang kepartaian. Dalam Tap ini disebutkan agar pemerintah bersama DPR-GR segera membentuk UU mengatur kepartaian, keormasan dan karya yang menuju penyederhanaan. Pada fase ini, seperti digambarkan diatas, proses penciptaan Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP), cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Proses penciptaan KDP merupakan tahap awal dari ide pembentukan kehidupan politik di tingkat praktik. Proses ini ditandai oleh serangkaian kegiatan antara presiden dengan tokoh-tokoh partai yang diinisiatifkan oleh presiden (Cornelis, 2010: 15). Suatu gerakan biasanya menggunakan politik untuk mengadakan suatu perubahan terhadap suatu tatanan yang ada dalam masyarakat, bahkan ada yang sampai ingin menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar baru. Partai politik memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar perubahan, partai politik juga ikut mengadu nasibnya dalam pemilihan umum. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya berdasarkan ideologi tertentu.

Setelah melampaui fase musyawarah panjang, tiga kemungkinan nama muncul sebagai bakal nama partai baru. Masing-masingnya adalah sebagai berikut: Partai Demokrasi Pancasila, yang akhirnya dibatalkan penggunaannya karena mempertimbangkan kesan pada nama tersebut yang mengandalkan pihak lain di luar mereka tidak Pancasila.

Partai Demokrasi Pembangunan, yang dianggap juga belum memadai; serta Partai Demokrasi Indonesia, yang dianggap telah mencakup kedua pengertian yang terkandung dalam nama sebelumnya (Imam, 20 Februari 2013).

Tercapainya konsensus atas nama di atas, terutama, karena adanya pertimbangan serta keyakinan bahwa partai baru tersebut haruslah mencerminkan suatu bentuk demokrasi yang Indonesia. Suatu bentuk ekspresi pemihakan kultural terhadap ide demokrasi dimana demokrasi coba dieja kedalam konteks cita rasa kultural negeri sendiri. Demokrasi Indonesia menurut para pengagasnya dipahami sebagai suatu kesatuan pengertian yang menunjukkan perbedaan diri dengan demokrasi lainnya. Penyingkatan menjadi PDI akhirnya terjadi juga, bukan sebagai hasil kesepakatan para pendirinya, akan tetapi lebih sebagai produk kerja media massa yang didorong oleh kepentingan praktis pemberitaan. Dengan singkatan PDI, dirasakan lebih ringkas dan lebih mudah untuk diingat.

Sekali pun deretan perbedaan masih saja ada di lingkungan lima parpol yang akan berfusi, tapi secara maksimal dapat menyingkirkan sekat-sekat pembentuk perbedaan dan mulai memikirkan persamaan-persamaannya. Dengan semangat menemukan persamaan ini, berbagai perbedaan dapat disisihkan dan pada pertemuan 10 Januari yang dipimpin oleh Ben Mang Reng Say dari Partai Katolik, dan berhasil dirajut sejumlah prinsip dasar yang sama. Prinsip-prinsip dasar ini kemudian dikemas dalam bentuk deklarasi, yaitu "Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia".

Deklarasi Pembentukan PDI ini akhirnya ditandatangani pada pukul 00.00 tanggal 10 Januari 1973, dan akhirnya dikenal dengan "Deklarasi 10 Januari 1973". Deklarasi ini secara ideal diimpikan sebagai "*pernyataan kelahiran PDI dan sekaligus dijadikan sebagai landasan dan sumber bagi kehidupan serta gerak dan kegiatan Partai selanjutnya*" (Laporan DPP PDI: 37). Partai politik merupakan simbol kemajuan

sebuah masyarakat politik, tetapi juga tidak jarang partai politik sering menimbulkan permasalahan maupun kemacetan baik dibidang ekonomi, sosial, bahkan politik itu sendiri sebagai penyebab rendahnya etika kultural. Keberadaan partai politik di dalam masyarakat yang tengah berkembang sangat tepat untuk dikaitkan dengan persoalan pembangunan dinamika politik. Demikian pula yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan melihat fakta-fakta yang ada selalu disertai dengan dinamika politik yang terus berubah dan berkembang menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi suatu partai politik yang berperan dalam perjalanan partai politik Indonesia.

Aktivitas Partai Demokrasi Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977-1987

Setelah tahun 1971, pelaksanaan Pemilu yang teratur mulai terlaksana. Pemilu selanjutnya diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal itulah Pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Antara tahun 1971 dan 1977 hanya terjadi sedikit perubahan pola dalam pemantapan kontrol politik Orde Baru. MPR pertama yang sesuai dengan konstitusi, bersidang di awal 1973, memilih Soeharto menjadi Presiden dan Sultan Yogyakarta sebagai Wakil Presiden serta menerima tanpa perubahan rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diajukan pemerintah (R. William, 1992: 39).

Partai Demokrasi Indonesia yang berwatak serta bercirikan Demokrasi dan Keadilan Sosial mencoba membangun citranya sebagai partai rakyat kecil, namun susah untuk dibilang efektif.

Sebagaimana sudah kita lihat partai ini terdiri dari unsur-unsur yang sama sekali tidak ada kesamaan jalan pikirannya satu sama lain. Karena ketidak mampuannya merumuskan siapa dirinya, maka diapun tidak mampu menumbuhkan proses identifikasi massa pemilih dengan dirinya (Prisma 9 September 1981). Karena itu harian kompas menulis:

“Dibandingkan dengan kedua kekuatan yang lainnya, Partai Demokrasi Indonesia memberikan kesan paling sebagai “underdog”. Hal itu tampak jika kita misalnya mengamati jumlah tanda gambar yang tersebar dalam masyarakat dan tokoh-tokoh yang terjun dalam kampanye. Bukannya mereka kalah dari kedua kontestan lainnya. Tetapi sekurang-kurangnya, sejauh ini mereka tidak menurunkan tokoh-tokoh tua maupun muda di kalangan mereka, yang mestinya juga akan mampu memberikan gairah dan meningkatkan postur” (Kompas 25 Maret 1977).

Terdapat suatu laporan dari daerah Garut tentang PDI dikatakan sebagai berikut:

Akan halnya PDI tampaknya belum muncul sebagai pemain. Tanda gambar PDI hanya sekali-sekali saja terlihat di pinggir jalan atau tertempel di rumah-rumah anggota dan simpatisan. Ketika ditanya petugas PDI hanya menjawab : “Kami memang masih menghadapi berbagai kesulitan, ya kesulitan politis ya kesulitan dari pihak penguasa, ya kesulitan sarana” (Merdeka 24 Maret 1977).

Di tahun 1976, isu penting pemilihan umum ialah penentuan simbol partai dan Golkar yang akan dicetak sebagai tanda gambar. PDI di haruskan

mengubah rancangan aslinya dengan perisai yang mencerminkan dan menyerupai salah satu gambar Pancasila yang dibuat sedemikian rupa sehingga memperkuat identifikasi partai dengan seekor banteng yang menjadi simbol PNI lama. Tindakan terakhir pra kampanye pemerintah ialah penyaringan keamanan calon-calon partai dan Golkar untuk lembaga legislatif ketiga tingkat pusat, provinsi, dan kotamadya yang akan dipilih. Meskipun menurut banyak laporan, lubang-lubang keamanan itu lebih longgar dari tahun 1971.

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Sedangkan PDI merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi dibanding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik.

Kampanye Pemilu tahun 1982 diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan dan atau anggota Organisasi atas nama Dewan Pimpinan, dan kegiatannya hanya dilaksanakan selama jangka waktu kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah (45 hari).

Demikian disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang "Tata cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan

Ketentuan Mengenai Masa Tenang", yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 1982. Ketentuan mengenai kampanye Pemilu harus ditaati oleh organisasi serta dilaksanakan dengan seksama, tertib, kesatria, jujur dan bertanggung jawab (Surabaya Post 18 Januari 1982).

Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, selaku ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), menandakan anjuran untuk tidak memilih dalam Pemilu mendatang atau untuk ikut Golput (Golongan Putih) merupakan anjuran yang merusak serta menghambat pembangunan politik rakyat.

"Anjuran itu juga merupakan tindak pidana yang menyesatkan rakyat," kata Mendagri dalam sambutannya pada upacara penandatanganan daftar calon tetap anggota DPR-RI hasil Pemilu 1982 di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut juga mengemukakan, kampanye Pemilu 1982 akan berlangsung selama 45 hari mulai 15 Maret 1982 pukul 00.00 dan berakhir tanggal 28 April 1982 pukul 24.00. Sedangkan masa tenang mulai 29 April 1982 pukul 00.00 sampai dengan 3 Mei 1982 pukul 24.00 kata Mendagri Amirmachmud (Surabaya Post 10 Februari 1982).

Wakil Presiden Adam Malik menegaskan kembali bahwa kampanye Pemilu tidak boleh memecah persatuan, melainkan harus menjadi sumber kekuatan persatuan nasional. Menurut Wapres, boleh saja mengemukakan atau menonjolkan masalah agama dalam kampanye, ataupun mengetengahkan ayat-ayat, asal untuk persatuan dan pembangunan. Sebaliknya kalau untuk memecah belah, untuk menjelek-jelekan orang lain tentu tidak boleh, sebab yang demikian akan menimbulkan masalah ideologi, yang dapat menghancurkan republik ini (Surabaya Post 8 April 1982).

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada

tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara Nasional Golkar meningkat. Dari 75.126.306 suara sah, Golkar berhasil memperoleh suara 48.334.724 suara. Memperoleh tambahan 10 kursi dari menjadi 242 kursi dibandingkan Pemilu 1977. Secara nasional PPP memperoleh 20.871.880 suara dan kehilangan 5 kursi menjadi 94 kursi. Begitu pula dengan PDI yang kehilangan 5 kursi menjadi 24 kursi dan mendapatkan 5.919.702 suara.

Pemilu 1987 ditandai oleh perkembangan penting dalam upaya melanjutkan proses pembaharuan politik yang memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pertama mengangkat asas yang meliputi dasar, landasan, pedoman pokok, organisasi politik dan peserta pemilihan umum. Kedua mengenai tanda gambar sejalan dengan ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas maka dilakukan penyempurnaan tanda gambar. PPP yang dalam pemilu 1982 menggunakan gambar Ka'bah dalam pemilu 1987 memakai tanda gambar bintang ditengah segi lima. Demikian pula dengan PDI yang sebelumnya menggunakan tanda gambar banteng dengan latar belakang beringin disertai padi dan kapas di bagian kiri dan kanan, kemudian menggunakan tanda gambar banteng, sedangkan Golkar tetap menggunakan tanda gambar pohon beringin.

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 suara. Hasil pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi dengan 13.701.428 suara. Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi dengan 62.783.620 suara. PDI berhasil menambah perolehan

kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini dengan 9.384.708 suara (www.kpu.go.id 3 Juni 2013).

Aktivitas PDI Kota Surabaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977-1987

Khusus mengenai kampanye Pemilu yang berlangsung 24 Februari hingga 24 April 1977 itu dinyatakan terbuka di seluruh wilayah Indonesia bagi para peserta Pemilu untuk melakukannya. Mengenai tanda gambar para peserta Pemilu diharapkan dapat diajukan beberapa buah (alternatif) untuk dipilih. Hanya ditegaskan bahwa tanda gambar itu dilarang mirip dengan lambang negara Republik Indonesia. Menteri Penerangan Mashuri SH yang dalam Lembaga Pemilu adalah wakil Ketua, yang menjelaskan bahwa Pemilu adalah salah satu cara bagi penyaluran aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya. Pemilu adalah suatu peristiwa besar nasional yang memerlukan partisipasi dan dukungan materiil yang sangat besar pula.

Untuk Pemilu 1977 nanti penduduk Indonesia berdasarkan sensus 1971 diperkirakan berjumlah 133.650.413 orang dengan setiap 400.00 penduduk diwakili oleh seorang anggota DPR (Surabaya Post 20 April 1976). Pelantikan DPR dan MPR dilakukan serentak pada tanggal 28 Oktober 1977.

Hasil perolehan suara Pemilu 1977 Kotamadya Surabaya dari jumlah total pemilih 845.322 suara, PPP mendapat 274.093 suara, Golkar 432.642 suara, dan PDI 138.587 suara. Dari hasil tersebut PDI Kotamadya Surabaya mendapat 4 kursi yang berarti mengalami kenaikan satu kursi dibandingkan dengan hasil Pemilu 1971 (Surabaya Post 20 April 1976).

Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, selaku ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), menandatangani anjuran untuk tidak memilih dalam Pemilu mendatang atau anjuran untuk ikut Golput

(golongan putih) yang dapat merusak serta menghambat pembangunan politik rakyat. Kampanye Pemilu 1982 berlangsung selama 45 hari mulai 15 Maret 1982 pukul 00.00 dan berakhir 28 April 1982 pukul 24.00. Sedangkan masa tenang mulai 29 April 1982 pukul 00.00 sampai dengan 3 Mei 1982 pukul 24.00 (Surabaya Post 10 Februari 1982).

Hari pertama kampanye Pemilu di Surabaya, masih terasa “sepi”, pemasangan tanda-tanda gambar ketiga kontestan belum terlihat di segala sudut kota. Bahkan PPP baru memasang tanda gambar besar di Wonokromo dan Indrapura saja (Surabaya Post 15 Maret 1982).

Kota Surabaya dan seluruh warganya telah siap menyongsong hari Pemilu. Banyaknya orang yang pulang kampung juga hampir seramai Lebaran (Surabaya Post 3 Mei 1982). Penumpang meningkat di terminal bus, stasiun kereta api, dan terminal colt. Di bidang keamanan, 60 persen petugas Kowil Kepol 101 dikerahkan. Di bidang komunikasi kerja sama Orari dan Kodak X Jatim ditingkatkan, para anggota Orari turun ke lapangan membantu jalannya Pemilu.

Jumlah pemilih sah di Kotamadya Surabaya sebesar 965.004 suara. PPP memperoleh 319.118, Golkar 467.049 dan PDI 178.837. Karena kursi yang dibagi 32 buah, maka bilangan pembagi didapat 30.156 suara untuk sebuah kursi. Dengan demikian PPP memperoleh 10 kursi ditambah 17.558 sisa suara, Golkar 15 kursi ditambah 14.709 sisa suara dan PDI mendapat 5 kursi ditambah 28.057 sisa suara (Surabaya Post 10 Mei 1982). Untuk tahap pertama dibagi 30 kursi, sehingga masih tersedia 2 kursi lagi yang diberikan kepada sisa suara terbesar pertama dan kedua.

Untuk itu PDI dan PPP berhak memperoleh tambahan masing-masing 1 kursi. Sesuai SK Mendagri jumlah kursi di

DPRD KMS 40 buah dengan perincian 32 kursi dipilih, 2 dari Golongan Karya Non-ABRI dan 6 dari Golongan Karya ABRI diangkat.

Hasil Pemilu 1987 ternyata mengubur sejumlah ramalan yang diungkap beberapa pengurus OPP di Jatim. Bahkan Blegoh Soemarto, ketua DPRD Jatim, yang sudah membuat ramalannya dalam amplop tertutup sehari sebelum pemungutan suara, ternyata meleset. Ia benar memperkirakan PPP turun dan PDI naik, namun untuk Golkar ia hanya menyatakan target tercapai dengan cukup berat. Hasil akhir Golkar memang cukup besar dan melebihi target (Surabaya Post 24 April 1987). Hasil Pemilu di Surabaya tahun 1987 : PPP (224.756 suara), Golkar (622.689 suara), PDI (240.892 suara) dari jumlah total pemilih 1.088.337 suara.

Kesimpulan

Pada masa Orde Baru terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik karena partai politik dianggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas. Kebijakan penyederhanaan dilanjutkan dengan kebijakan fusi partai politik. Kongres PDI pertama 12-13 April 1976 hanya mengukuhkan fusi bekas lima partai kedalam wadah PDI yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IP-KI dan Murba.

Dari hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987 kota Surabaya, PDI mengalami peningkatan suara pada setiap Pemilunya. Walaupun hasil suara tidak meningkat secara signifikan tetapi terlihat kemajuan dari PDI khususnya pada hasil suara. Terlihat jelas pada Pemilu tahun 1987 dimana PDI menempati urutan nomor dua.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar dan Majalah:

Kompas, 25 Maret 1977.

Prisma, 9 September 1981.

Surabaya Post , 20 April 1976, 1 September 1976, 18 Januari 1982, 10 Februari 1982, 15 Maret 1982, 8 April 1982, Mei 1982, 10 Mei 1982, 24 April 1987.

Buku dan Laporan Penelitian:

Inu Syafie Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : PT. Retika Aditama.

Ipong S. Azhar. 1997. *Benarkah DPR Mandul Pemilu, Parpol, dan DPR Masa Orde Baru*, Yogyakarta : Bigraf Publishing.

Lay, Cornelis. 2010. *Melawan Negara PDI 1973-1986*, Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Laporan DPP PDI mengenai *Pertumbuhan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973* kepada Kongres I PDI, dalam "Kongres Pertama PDI", hlm 37.

William, R. Liddle. 1992. *"Pemilu-Pemilu Orde Baru"*, Jakarta : LP3ES.

Website:

www.kpu.go.id, di akses hari senin, tanggal 3 Juni 2013, pukul 13.00 WIB.

Nara Sumber:

Nama : Imam
Alamat : Bojonegoro
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Anggota Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur